

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat banyaknya jumlah anak putus sekolah yang terjadi dan untuk menghilangkan kesenjangan sosial dalam hal memilih sekolah, maka pemerintah khususnya menteri pendidikan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan menteri pendidikan memperbaiki sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan dan percepatan kualitas pendidikan.
2. Sasaran dari kebijakan atau peraturan tersebut mengarah kepada masyarakat dan siswa yang sedang melanjutkan sekolah jenjang selanjutnya. Kebijakan atau peraturan tersebut disosialisasikan kepada kepala sekolah hingga sampai ke masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memilih sekolah dan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah.
3. Manfaat dari dikeluarkan kebijakan atau peraturan ini adalah agar siswa yang memiliki nilai pas-pasan dan memiliki ekonomi menengah kebawah untuk bersekolah di sekolah negeri masih ada harapan. Untuk

orang tua siswa bisa menekan biaya sekolah mengingat jarak antara sekolah dan rumah tidak terlalu jauh.

4. Untuk tingkat pemahaman dinas pendidikan dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, dimana ketika pemerintah provinsi mengadakan sosialisasi terkait peraturan tersebut, dinas Pendidikan langsung membuat TIM PPDB untuk meneruskan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah dan juga warga masyarakat.
5. Sumber daya yang terdapat di dinas pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut kurang dalam mensosialisasikan peraturan tersebut. Kekurangan sumber daya manusai menjadi kendala yang dihadapi dinas pendidikan. Dengan staff yang terbatas untuk melakukan sosialisasi kesetiap kecamatan ataupun kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Selain sumber daya manusia, fasilitas pendidukung yang dimiliki juga sudah memadai karena untuk saat ini, jumlah kendaraan yang dimiliki dibanding dengan jumlah staff yang ada masih banyak jumlah kendaraan.
6. Standar baku yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Melaksanakan Kebijakan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) atau dalam PPDB disebut dengan juknis. Dengan adanya juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada sekolah-sekolah yang ada diwilayahnya sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka rekomendasi yang peneliti berikan untuk penelitian ini adalah:

1. Kebijakan atau peraturan pemerintah dalam hal ini menteri pendidikan dalam melaksanakan peraturan tersebut harus lebih maksimal dalam pelaksanaannya.
2. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat harus menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat sehingga memahami apa yang sudah menjadi peraturan dalam melaksanakan PPDB.
3. Mengenai sumber daya yang terbatas dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan ini, disarankan untuk membuka volunteer untuk membantu mensosialisasikan peraturan tersebut sehingga bisa menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat.